

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT MENUJU PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2024 DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

I Putu Nanda Paramarta

NPP. 31.0727

Asdaf Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Studi Politik Indonesia Terapan

Email: nandaspd01@gmail.com

Pembimbing Skripsi: M. Rifai, S.Ag, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) Kesbangpol is a government agency formed to manage national unity and political affairs in the country. In Badung Regency, Kesbangpol has the responsibility to handle issues of national unity and politics in the region. Kesbangpol Badung Regency is committed to making Badung Regency a region that has a high spirit of nationalism, democracy, security and upholds morality. **Purpose:** This study seeks to examine the Role of the National Unity and Political Agency in community political education towards the 2024 gubernatorial election in Badung Regency, Bali Province. **Method:** The research approach used by the author is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques used are data presentation, data analysis, data triangulation, and conclusion drawn. To examine the role of the National Unity and Political Agency in political education, this study uses the Role Theory proposed by Biddle and Thomas in Sarwono (2013) which includes Expectations, Norms, Performance, Evaluation and Sanctions. **Result:** The results of the study show that the Badung Regency National Unity and Political Agency through political socialization has run well according to the applicable rules, but there are still many people, especially the youth, who admit that they have not received these educational activities. **Conclusion:** more innovating in providing political education, optimizing social media by creating Kesbangpol accounts, and the implementation of political education that is not only focused on the millennial generation and generation Z but also targets housewives.

Keywords: : Political Education, Community Participation, Regional Head Election

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kesbangpol adalah salah satu instansi pemerintahan yang dibentuk untuk mengelola urusan kesatuan bangsa dan politik di dalam negeri. Di Kabupaten Badung, Kesbangpol memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah kesatuan bangsa dan politik di wilayah tersebut. Kesbangpol Kabupaten Badung berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Badung sebagai daerah yang memiliki semangat nasionalisme, demokrasi yang tinggi, keamanan dan menjunjung tinggi moralitas. **Tujuan:** Penelitian ini berupaya menelaah Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pendidikan politik masyarakat menuju pemilihan gubernur tahun 2024 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. **Metode:** Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah penyajian data, analisis data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menelaah peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pendidikan politik, penelitian ini menggunakan *Role Theory* (Teori Peran) yang dikemukakan Biddle dan Thomas pada Sarwono (2013) yang meliputi *Expectation* (harapan), *Norm* (norma), *Performance* (perilaku), *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung melalui sosialisasi politik telah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku namun masih banyak masyarakat khususnya kalangan pemuda mengaku belum mendapatkan kegiatan pendidikan tersebut. **Kesimpulan:** memberikan pendidikan politik, mengoptimalkan media sosial dengan membuat akun Kesbangpol, serta pelaksanaan pendidikan politik yang tidak terfokus pada generasi milenial dan generasi Z saja namun juga menyasar ibu rumah tangga.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi dengan berbagai lembaga yang menjalankan roda politik, salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kesbangpol mengelola urusan kesatuan bangsa dan politik, termasuk di Kabupaten Badung. Kesbangpol Badung bertujuan menjadikan daerah ini bersemangat nasionalisme, demokrasi tinggi, aman, dan bermoral. Mereka ingin menciptakan demokrasi yang aman melalui masyarakat yang cinta tanah air dan pendidikan politik. Pendidikan dan politik adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Untuk kehidupan bernegara yang lebih baik, diperlukan lembaga dan proses pendidikan yang membentuk sikap dan perilaku politik masyarakat agar tertib, adil, dan sejahtera (Faturrahman, 2012). Pemahaman tentang politik bisa disosialisasikan melalui pendidikan dan media lainnya. Karakteristik pendidikan yang ideal juga memerlukan lembaga dan proses politik di dalamnya.

Sosialisasi politik terdiri dari pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, dialami oleh semua kalangan, termasuk penguasa. Indoktrinasi politik, sebaliknya, adalah upaya penguasa menggerakkan masyarakat agar menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik oleh pihak berkuasa melalui pengarah paksa dan latihan disiplin (Supardan, 2008). Partisipasi masyarakat dalam politik adalah aspek penting dalam kehidupan negara demokratis. Pemerintah memberikan kesempatan luas dan bebas kepada warga masyarakat untuk beraktivitas politik, sementara masyarakat wajib ikut serta secara aktif. Partisipasi politik yang tinggi menunjukkan kekuatan demokrasi (Budiarjo, M. 2008)..

Setelah lima tahun, pemerintah kembali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sebagai bentuk implementasi kedaulatan rakyat. Pilkada adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, memungkinkan masyarakat menggunakan hak pilih tanpa tekanan. Pelaksanaan Pilkada serentak ini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Undang-undang ini memastikan masyarakat dapat memberikan suaranya. Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia telah ditetapkan undang-undang sejak tahun 2005, dengan gubernur, bupati, dan walikota dipilih langsung oleh rakyat sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Keterlibatan masyarakat dalam pemilu menunjukkan kuatnya proses demokrasi. Tahun 2024 menjadi tahun politik yang penting dengan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Pilkada serentak ini efektif dan efisien waktu serta menghemat anggaran negara. Pasca pandemi, momen ini bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi, memberikan dampak positif pada anggaran negara.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini menyoroti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak harus dilaksanakan dengan sistem yang berkualitas, namun pada pelaksanaan pemilu tahun 2018 banyak pemilih merasa kebingungan karena jumlah suara yang harus diberikan sangat banyak. Hal ini menimbulkan banyak suara tidak sah akibat kurangnya informasi dan multitafsir oleh pemilih (Prihatmoko, 2013). Hambatan pada pemilu 2018 ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pemilu serentak 2024. Banyaknya jumlah yang harus dicoblos membingungkan masyarakat, terutama pemilih pemula yang mungkin kesulitan menentukan pilihan sesuai hati nurani. Setiap warga negara memiliki hak politik yang digunakan saat pemungutan suara dalam pemilu. Untuk membentuk jiwa politik yang baik pada setiap individu, diperlukan pendidikan politik mengenai pentingnya suara yang diberikan untuk masa depan bangsa (Surbakti, 2010).. Dukungan pemerintah sangat penting dalam suksesnya Pilkada 2024, dimana pendidikan politik diharapkan memberikan gambaran, informasi, kesadaran, pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas tentang persoalan politik dan sikap politik yang dihadapi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertujuan agar masyarakat menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam urusan politik dan mampu menjadi pelaku politik aktif. Namun, pemahaman politik di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, masih rendah. Minimnya pemahaman mereka terhadap calon kepala daerah atau partai yang bertarung terlihat dari tingginya jumlah pemilih muda yang kurang mengenal pasangan calon maupun partai yang mereka dukung (Kristian, 2022). Ada juga pemilih muda yang memilih berdasarkan ketertarikan terhadap partai politik dominan, yang menciptakan partisipasi politik praktis tanpa pengetahuan mendalam tentang politik (Ariffin, 2019). Pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting, mengingat pemilu serentak yang akan dihadapi. Pesta demokrasi ini bertujuan menciptakan kondisi stabil dan efektif dalam pelaksanaannya. Pemilu serentak juga menekan pengeluaran anggaran negara. Salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2024 adalah Provinsi Bali, yang akan memilih gubernur pada 27 November 2024.

Demokrasi memerlukan partisipasi dan pengetahuan warga negara untuk berfungsi optimal. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan isu-isu politik sering menyebabkan dinamika politik. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Bali pada 2013 dan 2018 di Kabupaten Badung menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, meskipun terjadi penurunan partisipasi pada 2018 dibandingkan 2013, walaupun hanya sebesar 1,3%.ya

Persentase Pemilih Pemilu Serentak tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah pemilih di kabupaten Badung	403.326 pemilih	100 %
2	Jumlah pengguna hak pilih di kabupaten Badung	360.976 pemilih	89,50 %
3	Jumlah tidak guna hak pilih di kabupaten Badung	42.349 pemilih	10,5 %

Sumber: KPU Kabupaten Badung tahun 2024

Data pemilih pada Pilgub Bali di Kabupaten Badung pada 2013 menunjukkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 317.286 dengan tingkat partisipasi 79%, sementara pada 2018 jumlah DPT meningkat menjadi 365.293 namun partisipasi menurun menjadi 77,7%. Ini menunjukkan kenaikan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih dari 21% menjadi 22,3%. Pada pemilu serentak Februari 2024, jumlah pemilih di Kabupaten Badung adalah 403.326 dengan tingkat partisipasi tinggi mencapai 89,50%, melampaui target 82%. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus terus memberikan pendidikan politik untuk mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat. Menurut Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung wajib mengedukasi masyarakat tentang politik, untuk memastikan partisipasi aktif dan pemahaman yang baik dalam pemilu.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah memberikan pandangan yang berharga dalam pengelolaan aset tetap di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti Penelitian yang dilakukan oleh Dony Vega Prayogo dan Nova Wahyu Wardhani pada tahun (2022) mengenai "Implementasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat" di Kota Semarang telah memberikan inspirasi yang signifikan bagi penulis untuk mengembangkan penelitian lanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa pendidikan politik diimplementasikan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan politik kewarganegaraan, lomba pemilihan ketua OSIS, fasilitasi pemilu dan pilkada, serta edukasi yang melibatkan media sosial. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendidikan politik dalam membangun kesadaran dan partisipasi politik di kalangan masyarakat.

Penelitian ini menginspirasi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang efektivitas pendidikan politik di berbagai konteks dan kelompok masyarakat lainnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Alex Victor Wanma pada tahun (2013) tentang pentingnya pendidikan politik generasi muda di Distrik Semofa memberikan perspektif bahwa upaya untuk mendorong partisipasi politik di kalangan generasi muda seringkali tidak berhasil. Penulis tertarik untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya keberhasilan tersebut dan mencari solusi alternatif yang lebih efektif. Selain itu, penelitian Irlan Haerul pada tahun (2019) tentang peranan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik siswa di MA Al-Muthmainnah menunjukkan bahwa melalui pembelajaran yang terstruktur, partisipasi siswa dapat ditingkatkan. Hal ini memberikan dasar bagi penulis untuk mengeksplorasi metode pendidikan politik yang dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda.

Penelitian Abdullah Muqsih Mubarak pada tahun (2021) tentang peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menginternalisasi wawasan kebangsaan bagi generasi milenial di Kabupaten Majene juga memberikan inspirasi bagi penulis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dan pelaksanaan sosialisasi yang efektif dapat membantu menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan serupa dapat diimplementasikan di daerah lain dengan tantangan disintegrasi yang berbeda. Selanjutnya, penelitian Muhammad Ikhsan pada tahun (2021) tentang peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Kota Pekanbaru menemukan bahwa terdapat upaya-upaya untuk mengatasi hambatan partisipasi politik. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut strategi-strategi yang diterapkan dan menilai efektivitasnya dalam konteks yang berbeda.

Dengan menggabungkan berbagai temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis bertujuan untuk menyusun kerangka penelitian yang komprehensif yang tidak hanya mengevaluasi efektivitas pendidikan politik tetapi juga mengembangkan strategi inovatif untuk meningkatkan partisipasi politik di berbagai kalangan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung dalam pendidikan politik masyarakat menuju pemilihan gubernur tahun 2024. Meskipun Kesbangpol telah menjalankan sosialisasi politik sesuai aturan yang berlaku, masih terdapat gap dalam penyampaian pendidikan politik, terutama di kalangan pemuda. Pendekatan kualitatif yang digunakan, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis menggunakan teori peran Biddle dan Thomas (Sarwono, 2013), mengungkap bahwa harapan dan norma yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini menyoroti pentingnya optimalisasi media sosial melalui akun resmi Kesbangpol dan memperluas target pendidikan politik tidak hanya kepada generasi milenial dan Z, tetapi juga ibu rumah tangga. Temuan ini memberikan rekomendasi praktis bagi Kesbangpol untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan politik, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan aktif dalam proses demokrasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi dan ini berupaya menelaah Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pendidikan politik masyarakat menuju pemilihan gubernur tahun 2024 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

II. METODE

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena sesuai untuk memahami fenomena sosial, khususnya perilaku manusia, dalam konteks pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Badung menjelang Pilkada serentak 2024. Penelitian ini fleksibel dan alami, seperti yang dijelaskan oleh Harahap (2020), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif cocok untuk ilmu sosial dan humaniora. Idrus (2009). menambahkan bahwa pendekatan ini tepat untuk memahami fenomena sosial. Penelitian kualitatif adalah partisipatif dengan desain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi di lapangan..

Selain itu, Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa sumber data kualitatif mencakup informasi lisan dan tertulis yang diamati secara mendetail, pentingnya data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah proses pertukaran informasi antara peneliti dan informan, sedangkan Simangunsong (2017) menekankan pentingnya observasi partisipatif untuk mendapatkan data yang relevan. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan, seperti yang dijelaskan oleh Umar (2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menganalisa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung menggunakan teori Bidle dan Thomas (Sarwono, 2013) yang membagi peran menjadi beberapa faktor yaitu expectation (harapan), norm (norma), performance (wujud perilaku), evaluation (evaluasi) dan sanction (sanksi). Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung dilihat dari bagaimana pelaksanaannya berdasarkan aturan. Dalam mendalami dan menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung digunakan empat faktor di atas yang diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. **Expectation (Harapan)** dalam konteks peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung sangat penting untuk menciptakan eksistensi sikap yang kooperatif dan mewujudkan harapan sesuai dengan peran yang dimiliki. Dalam pendidikan politik, harapan ini diartikan sebagai cita-cita untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap sebagai kemajuan di masa depan.
 - a. **Menunjukkan Eksistensi Sikap yang Kooperatif**
Pendidikan politik sangat penting dalam upaya memperkuat peran masyarakat dalam keikutsertaannya pada demokrasi. Masyarakat perlu dibekali pemahaman yang memadai melalui pendidikan politik untuk menjadi penentu jumlah suara yang signifikan. Salah satu hal penting dalam pendidikan politik adalah membangun sikap yang kooperatif terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung. Sikap kooperatif ini mencakup saling mendukung dan memperkuat internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan masyarakat.
 - b. **Mewujudkan Harapan Sesuai dengan Peran yang Dimiliki**
Expectation (Harapan) merupakan cita-cita untuk mencapai sesuatu yang dianggap sebagai kemajuan di masa depan. Salah satu harapan terhadap pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi politik.
2. **Norm (Norma)** merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan sebuah kebijakan. Norma mendorong kegiatan yang dilakukan oleh organisasi harus sesuai dengan wewenang dan aturan yang berlaku, sehingga meminimalisir kesalahpahaman dan miskomunikasi.
 - a. **Adanya Peraturan yang Jelas**
Penyelenggaraan pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung harus mengantongi peraturan yang jelas untuk memastikan kualitas pendidikan politik yang baik dan efektif.
 - b. **Adanya Tugas Pokok dan Fungsi**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan politik. Tugas pokok dan fungsi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan organisasi tercapai dan hubungan harmonis dengan masyarakat terjaga.
3. **Performance (Wujud Perilaku)** diwujudkan oleh aktor harus dapat dilihat dari sifat-sifat tertentu agar orang lain memahami dengan jelas peran tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung memiliki peran sebagai penyelenggara pendidikan politik kepada masyarakat.

- a. Keikutsertaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Peran yang Dijalankan
Keikutsertaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pendidikan politik di Kabupaten Badung sangat penting untuk memperkuat sistem demokrasi dan membentuk masyarakat yang sadar akan politik.
 - b. Pelaporan Informasi Hasil Kegiatan
Pelaporan hasil kegiatan pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa tujuan kegiatan tercapai.
4. **Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi)** merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam evaluasi peran. Penilaian adalah wujud norma yang terjadi dalam masyarakat, sementara sanksi adalah proses penilaian dari individu untuk meyakinkan bahwa nilai yang sebelumnya dianggap negatif dapat menjadi positif.
- a. Menunjukkan Dampak yang Sesuai dengan Harapan
Dampak dari kegiatan pendidikan politik diharapkan menciptakan pemilih yang cinta damai dan saling menghargai, meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda.
 - b. Adanya Hasil Timbal Balik Antara Penyelenggara dengan Peserta
Hasil timbal balik yang positif antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan politik berhasil mencapai tujuannya.
 - c. Adanya Bentuk Sanksi dan Hukum
Sanksi yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung lebih bersifat preventif, yakni dengan memberikan pemahaman dan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

Dengan menggunakan empat faktor tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung dalam pendidikan politik masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam demokrasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung perlu terus melakukan pendekatan inovatif dan memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan edukasi politik agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.2. faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pendidikan Politik Masyarakat

Pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur Bali 2024 di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tersebut menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya melaksanakan kegiatan pendidikan politik secara tatap muka, terutama karena banyak warga yang bekerja di sektor jasa pariwisata, sehingga persentase kehadiran dalam kegiatan pendidikan politik tidak mencapai 100%. Kepala Kesbangpol Kabupaten Badung menyatakan bahwa warga memiliki mobilitas tinggi dan kesibukan yang sering menghalangi kehadiran mereka. Untuk mengatasi hal ini, diusulkan penggunaan media sosial dan lembaga tradisional sebagai alternatif.

Sekretaris Kesbangpol juga mengakui bahwa dari 100 orang yang diundang untuk mengikuti pendidikan politik, hanya sekitar 75 orang yang hadir, menunjukkan perlunya penyesuaian waktu kegiatan agar lebih sesuai dengan jadwal masyarakat, terutama generasi muda yang sibuk dengan

kuliah atau pekerjaan. Minat rendah dari pemuda dalam mengikuti kegiatan pendidikan politik juga menjadi kendala signifikan. Kegiatan yang terkesan terlalu kaku dan formal tidak menarik bagi mereka.

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Kesbangpol sendiri menjadi penghambat. Banyak aparatur yang tidak memiliki dasar menjadi narasumber pendidikan politik, sehingga harus mengandalkan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pendidikan politik. Sekretaris Kesbangpol mengakui bahwa pihaknya berperan sebagai mediator dan menggunakan jasa KPU maupun Bawaslu karena mereka lebih berpengalaman dalam memberikan pemahaman politik.

Upaya peningkatan partisipasi yang dilakukan Kesbangpol Kabupaten Badung lebih difokuskan pada generasi milenial dan Generasi Z, mengingat data KPU menunjukkan jumlah pemilih dari generasi milenial mencapai 107.939 orang, sedangkan Generasi Z berjumlah 87.721 orang. Kesimpulannya, kegiatan pendidikan politik yang dilakukan Kesbangpol Kabupaten Badung menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi karena kesibukan warga, kurangnya minat pemuda, dan rendahnya kualitas SDM aparatur Kesbangpol. Oleh karena itu, diperlukan upaya inovatif dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik menuju Pemilihan Gubernur Bali 2024.

3.3. Upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung dalam mengatasi hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2024, beliau mengungkapkan bahwa strategi menghadapi kendala partisipasi politik melibatkan media sosial dan pertemuan dengan lembaga-lembaga tradisional seperti pecalang, bendesa adat, subak, pekaseh, dan sekaa truna. Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik daerah dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang lebih interaktif dan relevan. Hal serupa diungkapkan oleh Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Badung pada tanggal 12 Januari 2024, yang menekankan pentingnya strategi "jemput bola" dimana pihak Kesbangpol yang mendatangi masyarakat untuk meminimalisir hambatan seperti biaya transportasi dan waktu.

Selanjutnya, Sekretaris KPU I Wayan Nopiek pada tanggal 15 Januari 2024 juga menyatakan pentingnya inovasi untuk menarik minat masyarakat dalam partisipasi politik. Menurutnya, keterlibatan budayawan dan seniman dalam kegiatan sosialisasi dapat membuat masyarakat lebih tertarik dan merasa nyaman untuk berpartisipasi. Sosialisasi yang sebelumnya terkesan formal dapat diubah menjadi lebih hangat dan bersifat kekeluargaan dengan kolaborasi dari berbagai pihak tradisional dan seniman, menciptakan hiburan tanpa menghilangkan makna edukatif dari kegiatan tersebut. Pemanfaatan media sosial juga disebutkan sebagai cara untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak dapat menghadiri acara secara langsung. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat tidak merasa bosan dan tetap tertarik dengan acara yang diberikan.

Berdasarkan observasi, Badan Kesbangpol Kabupaten Badung telah melaksanakan beberapa kali pendidikan politik sepanjang tahun 2023, meskipun jumlahnya terbatas, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan 2021 yang terdampak pandemi Covid-19. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Dengan strategi yang lebih merata dan inovatif, diharapkan partisipasi politik masyarakat dapat meningkat dan memberikan hasil yang memuaskan pada pemilihan Gubernur Bali tahun 2024.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Ada hal menarik yang peneliti temukan jika membandingkan hasil temuan dengan salah-satu penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penelitian terkait peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam pendidikan politik, kita dapat melihat berbagai kesamaan dan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan hasil yang dicapai di Kabupaten Badung, Bali, dan Kota Pekanbaru, Riau.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh I Putu Nanda Paramarta (2024) di Kabupaten Badung, Bali, menggunakan teori Bidle dan Thomas (Sarwono, 2013) untuk menganalisis peran Kesbangpol dalam pendidikan politik. Teori ini membagi peran menjadi beberapa faktor yaitu expectation (harapan), norm (norma), performance (wujud perilaku), evaluation (evaluasi), dan sanction (sanksi). Penelitian ini menyoroti pentingnya harapan dan norma dalam menciptakan sikap kooperatif serta mewujudkan harapan sesuai peran yang dimiliki Kesbangpol. Penekanan pada norma memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, meminimalisir miskomunikasi dan kesalahpahaman. Wujud perilaku dari Kesbangpol di Badung mencakup keikutsertaan dalam pendidikan politik serta pelaporan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Evaluasi dan sanksi juga memainkan peran penting dalam memastikan kegiatan pendidikan politik mencapai tujuannya dan menghasilkan timbal balik yang positif antara penyelenggara dan peserta.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program pendidikan politik di Badung. Hambatan utama adalah rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan tatap muka, terutama karena banyaknya warga yang bekerja di sektor pariwisata dengan mobilitas tinggi. Untuk mengatasi hal ini, Kesbangpol mengusulkan penggunaan media sosial dan lembaga tradisional sebagai alternatif. Rendahnya minat dari pemuda serta kurangnya kompetensi sumber daya manusia di Kesbangpol juga menjadi kendala. Untuk mengatasi hambatan ini, Kesbangpol mengadopsi pendekatan inovatif seperti kolaborasi dengan budayawan dan seniman untuk menarik minat masyarakat dalam partisipasi politik.

Di sisi lain, penelitian oleh Muhammad Ikhsan (2022) di Kota Pekanbaru, Riau, menggunakan teori peran menurut Levinson dalam Soekanto mencakup norma dan aturan, perbuatan atau tindakan organisasi, dan perilaku individu/masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya peraturan sebagai landasan hukum bagi Kesbangpol dalam melaksanakan peranannya. Di Pekanbaru, Kesbangpol menghadapi kendala utama dalam bentuk keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program pendidikan politik secara optimal. Meskipun Kesbangpol telah menjalankan berbagai program seperti penyuluhan politik dan sosialisasi di sekolah-sekolah, minimnya anggaran menyebabkan program tersebut belum mampu memenuhi harapan untuk mendorong partisipasi politik generasi muda secara maksimal.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya struktur sosial dalam menentukan keberhasilan program pendidikan politik. Tingkat pemahaman politik generasi muda di Pekanbaru masih tergolong kurang, dipengaruhi oleh struktur sosial dan tingkat pendidikan. Kesbangpol Pekanbaru telah berupaya mengatasi hambatan ini dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada, melakukan improvisasi dalam melaksanakan kegiatan, dan memprioritaskan program dengan anggaran yang terbatas. Upaya untuk mengubah pola pikir generasi muda terhadap politik juga dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan politik.

Secara keseluruhan, kedua penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol di masing-masing wilayah memiliki peran penting dalam pendidikan politik masyarakat. Namun, masing-masing menghadapi hambatan yang berbeda. Di Kabupaten Badung, hambatan utama adalah rendahnya partisipasi warga dan kompetensi sumber daya manusia, sementara di Kota Pekanbaru, kendala utama adalah keterbatasan anggaran dan struktur sosial yang mempengaruhi tingkat pemahaman politik generasi muda. Kedua penelitian juga menyoroti pentingnya pendekatan inovatif dan kolaboratif untuk

mengatasi hambatan ini, seperti memanfaatkan media sosial, melibatkan lembaga tradisional, dan budayawan untuk menarik minat masyarakat dalam partisipasi politik. Dengan strategi yang tepat, diharapkan partisipasi politik masyarakat dapat meningkat, terutama menjelang pemilihan penting seperti Pemilihan Gubernur Bali 2024 dan pemilihan umum lainnya.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung dalam pendidikan politik masyarakat menjelang pemilihan gubernur tahun 2024 di Provinsi Bali. Kesbangpol memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga semangat nasionalisme, demokrasi, dan keamanan di wilayah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan penyajian data, analisis, triangulasi, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan Role Theory dari Biddle dan Thomas yang mencakup harapan, norma, perilaku, penilaian, dan sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi politik oleh Kesbangpol sudah berjalan baik sesuai aturan, namun masih banyak masyarakat, terutama kalangan pemuda, yang belum terlibat dalam kegiatan pendidikan politik tersebut.

Keterbatasan Penelitian : Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat dalam wawancara yang dilakukan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : penelitian ini dapat diperluas untuk mengintegrasikan analisis dampak sosial dari perspektif masyarakat yang lebih luas, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberhasilan program ini dalam jangka panjang dalam menyelenggarakan pendidikan politik yang mencakup berbagai kelompok masyarakat, termasuk ibu rumah tangga, untuk menjangkau lebih banyak audiens

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepada Kepala Kesbangpol Kabupaten Badung jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Faturrahman, D. (2012). *Pengantar Pendidikan*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga.
- Prihatmoko, J. (2013). *Menang Pemilu ditengah Ologarki Partai*. Pustaka Pelajar.
- Sarwono, W. S. (2013). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Simangunsong. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Alfabeta.

Supardan, D. (2008). *Pengantar Ilmu Sosial sebuah kajian pendekatan struktural*. Bumi Aksara.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta PT Grasindo (p. 152).

Umar, S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Bumi Aksara.

Ariffin, M. (2019). Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 4(2) <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/mitzal/article/view/457>

Haerul, I. (2019). Peranan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas X Di Ma Al-Muthmainnah. *Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 1–16. <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/571>

Ikhsan, M. (2022). *Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Di Kota Pekanbaru*. 1–12. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9947>

Mubarak, A. M. (2021). Peran Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Internalisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Milenial Untuk Menghadapi Disintegrasi Bangsa Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. *Sosial*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/7731>

Prayogo, D. V, & Wardhani, N. W. (2022). Implementasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat. *Unnes Political Science Journal*, 6(1), 25–30. <https://doi.org/10.15294/upsj.v6i1.55201>

Wanma, A. V. (2015). Pentingnya-pendidikan-politik-generasi-muda-terhadap-pelaksanaan-partisipasi-poliTIK. *Fisip UNSRAT*. <https://media.neliti.com/media/publications/1123-ID-entingnya-pendidikan-politik-generasi-muda-terhadap-pelaksanaan-partisipasi-poli.pdf>

KRISTIAN, Y. (2022). PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT UNTUK Mendukung PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA STABILITAS POLITIK DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Doctoral dissertation, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11476>